

PESANTREN KESEJAHTERAAN: REKONSTRUKSI PERAN SOSIAL-EKONOMI UNTUK KEADILAN SOSIAL

R Lukman Fauroni
Dosen IAIN Surakarta

Abstract: *Demands a stronger social role directing boarding on expanding its role to create social welfare . Welfare of the students and the community can be achieved through the optimization of leadership functions supported by a network of economic business schools . Al – Ittifaq Boarding schools realize social welfare through a system of collegial business network : kopontren as the core plasma, farmer groups , DKM , and alumni as a standalone plasma . The gift of God's power management based on high trust of the pesantren . As a source and motor of Islamic economics , thereby boarding schools can realize the prosperity that is boarding the welfare of society simultaneously .*

Keywords : *The welfare's boarding school , business networks collegial , trust*

Abstrak: *Tuntutan peran sosial yang lebih kuat mengarahkan pesantren pada perluasan perannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan santri dan masyarakat dapat dicapai melalui optimalisasi fungsi kepemimpinan yang didukung oleh jaringan usaha ekonomi pesantren. Pesantren al-Ittifaq merealisasikan kesejahteraan sosial melalui sistem jaringan bisnis kolegal: kopontren sebagai inti plasma, kelompok tani, DKM, dan alumni sebagai plasma mandiri. Dilakukan pula manajemen daya guna karunia Allah berdasar trust yang tinggi terhadap pesantren. Sebagai sumber dan penggerak ekonomi Islam, dengan demikian pesantren dapat merealisasikan pesantren kesejahteraan yaitu pesantren yang mensejahterakan masyarakat secara simultan.*

Kata kunci: *Pesantren kesejahteraan, jaringan bisnis kolegal, trust.*

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan sosial saat ini semakin dibutuhkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanahkan agar pemerintah serta elemen-elemen penyelenggara kesejahteraan sosial harus aktif mendukung dan bekerja sama dalam merealisasikan kesejahteraan sosial. Undang-undang nomor 11 kemudian diperkuat oleh PP Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam peraturan pemerintah itu, ditegaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam pandangan Midgley, kondisi kesejahteraan sosial harus mencerminkan tiga elemen dasar, *pertama*, ketika, masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya. *Kedua*, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga dapat hidup layak. Dan *ketiga*, ketika masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.

Realitas tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, hingga kini belum mencapai hasil yang optimal. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat adanya peningkatan angka jumlah orang miskin di Indonesia tahun 2012-2013 yang mencapai 96 juta jiwa. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,4 juta jiwa.¹

Dari sisi daya beli masyarakat, menurut data Apindo, dengan adanya penurunan nilai rupiah terhadap Dolar, sejak Juli 2013 daya beli masyarakat telah turun 10%.²Dua data di atas, menunjukkan indikasi yang kuat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Hal ini didukung pula oleh adanya gap yang tajam antara kalangan menengah atas dengan kalangan miskin. Jumlah kalangan menengah-atas diperkirakan tidak lebih dari 30%. Dengan demikian, menjadi hal yang sulit untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Realitas demikian, guna mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tidak boleh bertumpu pada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah. Diperlukan perluasan peran dari berbagai elemen

masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pendidikan. Bahkan, pranata-pranata sosial pun, harus bahu-membahu dalam upaya ini. Permasalahannya adalah, lembaga sosial manakah yang berpotensi kuat menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dan bagaimana pula merealisasikannya?

Peran dan fungsi pesantren, kini bukan semata bidang pendidikan dan dakwah, melainkan telah meluas hingga ranah ekonomi dan politik. Perluasan peran pesantren, dapat terjadi karena dialog inten antara realitas internal yang bersifat dinamis dan realitas di luar pesantren yang dipahami sebagai tantangan dan peluang. Dinamika internal pesantren, yang bersumbu pada pengembangan keilmuan memudahkan terjadinya perluasan peran guna optimalisasi kemaslahatan bagi masyarakat.

Pesantren Al-Ittifaq

Al-Ittifaq merupakan pondok pesantren yang telah berusia lanjut, yakni lebih dari 73 tahun. Atas restu Kanjeng Dalem Wiranata Kusumah, Wedana Ciwidey saat itu, pesantren ini didirikan dengan nama Pesantren Ciburial pada tanggal 16 Syawal 1302 H/ 1 Pebruari 1934 M oleh KH. Mansyur, seorang ulama di Ciwidey.

Walaupun pendiriannya melalui restu pemerintahan Belanda, namun tidak sejalan dengan pandangan penjajah Belanda. Hal ini

¹<http://www.tnp2k.go.id>

²Metro Tv News

terbukti dari nasehat Kiai Mansyur agar masyarakat tidak usah menyekolahkan anaknya melainkan mengaji saja. Para santri diharamkan belajar menulis latin dan tidak diperbolehkan kenal dengan pemerintahan Belanda. Hal-hal yang berbau Belanda seperti radio, sekolah, rumah tembok, menjadi pegawai pemerintah, merupakan hal yang tabu dan larangan keras bagi masyarakat.

Dari ajaran-ini kiyai mansyur dianggap kolot. Kondisi seperti itu bahkan masih terasa pengaruhnya hingga tahun 1980-an. Saat itu, ketika Kiai Fuad (cucu KH. Mansyur) bermaksud merenovasi bangunan masjid, dan bilik bambu menjadi bangunan permanen tembok agar dapat menampung jama'ah salat Jum'at lebih banyak. Namun, ia ditentang keras oleh masyarakat. Berbagai tuduhan ditudingkan kepada dirinya sebagai perusak tradisi.

Dalam suasana demikian, sistem pendidikan di Pesantren Ciburial hanya terbatas pada pola pendidikan tradisional yaitu model *sorogan*. Santri-santrinya hanyalah masyarakat sekitar Ciburial yang berjumlah antara 10 hingga 30 orang dan yang *mondok* hanya sepertiganya.

Kepemimpinan KH. Mansyur berlangsung sampai tahun 1953. Pada tahun tersebut, kepemimpinan diberikan kepada putranya, yaitu H. Rifai. Di bawah kepemimpinan H. Rifai, perkembangan

Pesantren Ciburial tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, berjalan dalam suasana tradisional dan kolot. Menurut KH. Fuad Affandi, perkembangan pesantren dibawah ayahnya, justru menurun. H. Rifai tergolong pendidik yang keras. Tradisi keningratan diterapkan secara ketat. Setiap orang yang bertemu di jalan, misalnya, harus membungkukkan badannya. Kondisi ini membuat jumlah santri semakin menyusut. Kondisi ini berlangsung kurang lebih 17 tahun hingga tahun 1970, sampai putranya, Fuad Affandi, menyelesaikan pelajarannya di Pondok Pesantren Lasetu, Jawa Tengah. Pada tahun 1970 inilah KH. Fuad Affandi, yang saat itu berusia 22 tahun mulai memimpin pesantren ini.

Sesuai dengan jiwa mudanya, Kiai Fuad melakukan beberapa kebijakan baru. *Pertama*, ia memberi nama Al-Ittifaq pada pesantren yang dipimpinnya. Nama ini berarti kesepakatan atau kerjasama yang bertujuan agar semua yang ada dalam naungan pesantren dapat melakukan kerja sama yang baik, atau sama-sama bekerja dengan baik. *Kedua*, melakukan reorientasi terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan pesantren selama dua periode kepemimpinan sebelumnya. *Ketiga*, menjadikan Al-Ittifaq sebagai pesantren khusus bagi orang-orang yang tidak mampu atau yatim piatu. *Keempat*, merintis kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, terutama sektor

pertanian, dengan tujuan agar pesantren dapat mandiri dalam membiayai kegiatan belajarnya. Pada masa KH. Fuad, Pesantren Al-Ittifaq mengalami kemajuan yang pesat, dapat terlihat pada:

1. jumlah santri meningkat menjadi 326 orang (256 putra dan 70 putri) dengan jumlah ustadz sebanyak 14 orang.
2. lahan yang diusahakan berkembang pesat, dari hanya 400 m², kini telah menjadi 14 hektar.
3. tiga unit bangunan asrama putra dan putri.
4. perkembangan kelembagaan agrobisnis, seperti kelompok tani sebanyak 5 kelompok, koperasi pondok pesantren, balai mandiri terpadu, pusat incubator agrobisnis, dan lain lain.

Tulisan ini akan membuktikan bagaimana pesantren merekonstruksi peran sosial ekonominya dan berhasil merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui pengembangan bisnis jaringan dan manajemen daya guna karunia Allah berdasar *trust* yang tinggi kepada kepemimpinan pesantren. Tulisan ini merupakan hasil penelitian studi kasus di pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kabupaten Bandung.

Gagalnya Negara Kesejahteraan

Dalam perspektif ekonomi, secara teoritis penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait dengan sejarah panjang negara

kesejahteraan. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan terjadi pada abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bagi Bentham aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Namun demikian, konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* ternyata tidak optimal dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. *Welfare state* sering kali hanya dipahami hanya ditujukan memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Konsep ini lahir sebagai koreksi atas kesalahan dan kelemahan Kapitalisme yang mempunyai kecenderungan berpihak pada "pemenang" persaingan di pasar. Sistem *welfare state* mendorong kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber dana guna pembangunan dan jaminan sosial masyarakat.³

Di sebagian negara Barat, sistem ini sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' Kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* diposisikan sebagai bentuk dari 'Kapitalisme yang baik hati' (*compassionate capitalism*).

³Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia, 2004, h. 20

Begawan ekonomi Prof Sarbini Sumawinata, mengingatkan bahwa kebijakan politik ala *welfare state* dapat membawa konsekuensi *passive* nya masyarakat miskin karena merasa "telah" terjamin. Sebaliknya, "tekanan" pajak pada kalangan produktif dapat menghambat produktivitas dan laju investasi. Karena itu, ekonomi kerakyatan jauh lebih baik, karena mengarahkan pada pemberian kesempatan semua pihak untuk melakukan upaya-upaya produktif.⁴

Bagi Sarbini, sistem *welfare state* tidak akan berguna bagi pembangunan di Indonesia. Ia tidak akan mampu membawa masyarakat pada cita-cita masyarakat adil dan makmur. Adanya sisi positif jangka panjang dari sistem ini sangat meragukan, sedangkan pada jangka pendek akan dirasakan dampak negatifnya pada bidang ekonomi, social bahkan politik. Falsafah dasar sistem *welfare ekonomi* ini berbeda dengan falsafah masyarakat Indonesia. Di samping itu, karena lahir dari falsafah Liberal Kapitalisme dalam mekanisme pasar bebas, maka orientasi sistem ini akan tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi material sebagai tujuan.⁵

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tugas utama yang hakiki negara dan pemerintah berdasar

titah Tuhan. Para pemegang amanah kekuasaan harus selalu berlaku adil dan tidak diskriminatif. Tidak berhenti di situ, setiap insan pun diberi kewajiban merealisasikan kesejahteraan sosial, melalui kewajiban zakat infaq dan shadaqah. "Harta benda itu tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja" (QS. 59:7), "Pada setiap harta benda terdapat hak bagi orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak". (QS. 51: 19).

Ekonomi Islam menempatkan distribusi setelah konsumsi. Distribusi akan memelihara kelancaran perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Faktor-faktor distribusi adalah, tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*).⁶

Eksistensi zakat, infak, shadaqah, merupakan di antara bukti kekuatan distribusi dalam Islam. Kekuatan itu mengarahkan pada realisasi kesejahteraan sosial. Bahkan tercermin pula dalam kebanyakan ajaran Islam selain ZIS. Ajaran ibadah Qurban, wakaf, wasiat, warisan, bahkan bisnis sekalipun. Bisnis dalam ekonomi Islam sangat bernuasa distribusi sosial ekonomi. Motif ekonomi

⁴Sarbini Sumawinata, h. 93-94

⁵*Ibid.* h. 109-11

⁶Muhammad Anas Zaqqa, "Islamic Distributive Scheme", Readings in Public Finance in Islam, Edited by Mahamoud A. Gulaid & Mohamed Aden Abdullah (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI) – Islamic Development Bank (IDB), 1995), hlm. 181-184.

bisnis Islam termasuk produksi, konsumsi dan distribusi adalah kemaslahatan. Keberhasilan yang dicapai melalui bisnis, diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi sesama.

Keharusan zakat harta, zakat profesi menunjukkan secara tegas bahwa bisnis Islam sangat bernuansa distribusi sosial ekonomi. Demikian pula, ketika bisnis itu harus berorientasi masa depan. Tujuan utama hidup manusia sebagai makhluk dan khalifah adalah merealisasikan kesejahteraan bersama di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Dengan prinsip itu, bisnis harus melampaui masa kini, esok, masa depan yang dekat dan masa depan yang jauh (hidup setelah mati). Bisnis harus mempunyai visi dan orientasi ke depan.⁷ Ash-Shaft (61): 10-11 secara tegas menunjukkan visi dan orientasi bisnis untuk masa depan.

Ketika konsep negara kesejahteraan gagal dan tidak cocok untuk diterapkan, sementara negara berada dalam keterbatasan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu digalakkan perluasan peran dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang potensial. Pemenuhan kebutuhan asasi dewasa ini sangat berat dirasakan oleh sejumlah besar masyarakat. Negara bukan menambah subsidi tetapi malah mengurangi. Akibatnya biaya-biaya fasilitas umum seperti air, listrik, bbm

(transportasi) dan komunikasi semakin tinggi. Pesantren-pesantren ekonomi, kiranya sangat potensial guna melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, guna realisasi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Peran sosial ekonomi Pesantren

Menurut Suyata, pesantren merupakan lembaga sosial yang hidup, yang motif tujuan dan usaha-usahanya bersumber pada agama. Pesantren merupakan lembaga ortodoksi Islam yang tumbuh dan berkembang atas cita agama Islam dan selalu mengajarkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam dalam keseluruhan aktivitasnya. Paling tidak terdapat tiga peran utama pesantren meliputi fungsi sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan masyarakat.

Pesantren selalu berproses bersama masyarakat dan berkarakter sosial kemasyarakatan sebagai *center of excellence* bagi pembinaan potensi dan pelayanan sosial bersama masyarakat di sekitarnya. Atas karakter itu Van Den Berg, Hurgronje dan Geertz, menyimpulkan bahwa pesantren betul-betul berpengaruh kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan, terutama di masyarakat pedesaan.⁸

⁷M Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam wawasan al-Qur'an", Jurnal Ulumul Qur'an No 3/ VII, 1997, hlm. 6.

⁸Zamakhsari Dhofier, 1982: 16.

Munculnya sebutan pesantren ekonomi menunjukkan adanya peran lebih suatu pesantren dalam pengembangan ekonomi di samping peran asasinya dalam bidang pendidikan dan sosial. Pesantren kehutanan menunjukkan peran lebih dalam pengembangan ekonomi berbasis kehutanan. Demikian pula, sebutan pesantren kelautan, pesantren agribisnis, pesantren ekonomi koperasi dan lain-lain. Sebutan-sebutan itu sama sekali tidak menghilangkan jati diri pesantren. Sebaliknya menunjukkan identitas baru atau varian baru peran pesantren dalam kehidupan kekinian.

Majalah Tempo edisi 21-27 September 2009 memuat laporan khusus dengan *head line cover*, "Seribu Wajah Pesantren". Liputan ini mengungkap fenomena perkembangan peran pesantren dalam pengembangan ekonomi sebagai jawaban atas tuntutan perubahan. Pesantren Sidogiri Pasuruan berkembang pesat dalam usaha-usaha berbasis koperasi pondok pesantren, BMT, BPRS, dan sepuluh usaha lainnya; toko buku, penerbitan, produksi air minum kemasan, studio foto, busana muslim.⁹

Pesantren Qamarul Huda Lombok pesat dalam kampanye lingkungan hijau dengan menanam lahan seluas 200 hektare. Pesantren Salafiyah Safi'iyah Gorontalo aktif

dalam membina kerukunan umat beragama dengan Hindu dan Kristen, juga memelopori usaha-usaha bidang agribisnis dan peternakan sapi. Pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman Parung pesat dalam usaha tambak ikan, pabrik roti dan pengolahan sampah menjadi kompos dengan luas 175 hektar, 35 hektarnya tambak ikan ber omzet Rp 4 miliar per tahun.¹⁰ Pesantren Al-Amin Kawalu Ciamis dalam usaha border, melibatkan santri, masyarakat dan 1500 alumni dengan Rp 2 miliar omzet per bulannya.¹¹

Pesantren Al-Ittifaq Rancabali kabupaten Bandung pesat dalam pengembangan ekonomi berbasis agribisnis. Dengan jaringan unit-unit usaha agribisnis, pusat inkubator agribisnis (PIA), kerjasama kemitraan yang kuat, pesantren al-Ittifaq telah mewujudkan menjadi entitas bisnis pesantren yang handal. Per bulan dalam mencapai omzet Rp 392.000.000,00-540.000.000,00 atau Rp 4,7 M - 6,4 M per tahun. Bahkan pada bulan-bulan tertentu mencapai Rp 500.000.000,00-600.000.000.¹² Dengan capaian kemajuan pengembangan ekonomi demikian, maka pesantren ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanakah hal itu dapat dicapai?

¹⁰Ibid., hlm. 49-52.

¹¹Ibid., hlm. 54.

¹²Wawancara dengan Hj Neneng Siti Ilan, 38 tahun, manager pemasaran kopontren Alif, 4 Juni 2010 dan 9 Agustus 2010.

⁹Tim, Majalah Tempo, edisi 21-27 September 2009, hlm. 23 dan 49.

Bisnis Jejaring

Pesantren Al-Ittifaq Bandung dalam dua dekade terakhir mengembangkan bisnisnya melalui pembudayaan ekonomi yaitu disatukan dalam ritme keseharian pesantren dan masyarakat. Pendidikan pelatihan dilakukan secara terpadu, bertahap, terstruktur dan berkesinambungan dalam suatu lingkungan budaya yang diciptakan agar mendukung usaha-usahanya. Santri dan masyarakat diarahkan menjadi pebisnis yang berkarakter unggul, melalui pengembangan *soft skill*, dukungan nilai ajaran agama, pendampingan, dukungan lingkungan serta tempaan persaingan dunia bisnis ril.

Pesantren ini memilih agribisnis sebagai media bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bisnis yang dikembangkan oleh pesantren memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dalam pengembangan bisnis pada umumnya. Menurut pimpinan pesantren, KH Fuad Affandi, tujuan bisnis adalah memberdayakan masyarakat dan bukan mencari keuntungan. Bisnis merupakan salah satu sarana utama untuk memberdayakan umat agar terbebas dari kefakiran dan kekufuran. Dalam rukun Islam hanya Syahadat saja yang tidak memerlukan biaya dan uang.

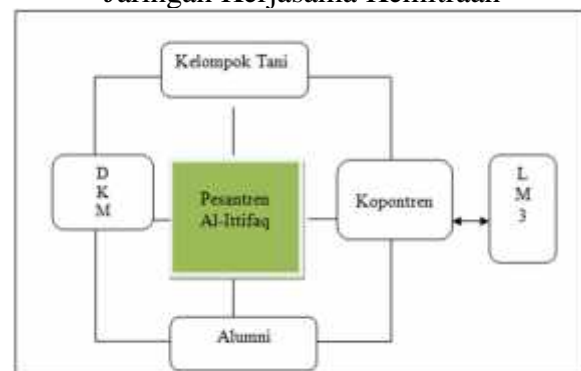
Azas kekeluargaan atau persaudaraan di pesantren ini dikembangkan guna menguatkan jaringan bisnisnya. Penerapan

azas ini pada tataran pertumbuhan dan penguatan entitas bisnis, dapat memperkokoh jalinan hubungan kemitraan yang solid dan akhirnya dapat berimplikasi terhadap distribusi sosial ekonomi yang berujung peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Setiap malam Selasa dan Kamis kliwon diadakan pertemuan yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Kelompok tani binaan pesantren, pengurus DKM, pengurus Majelis Ulama Kecamatan, alumni santri dan lain-lain. Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan kemasyarakatan termasuk pengembangan agribisnis. Kondisi ekonomi setiap anggota, dan bila ada yang terkena musibah atau kerugian dalam forum ini dicarikan solusinya. Demikian pula dibahas program pemerintah, bantuan permodalan dan lain-lain.

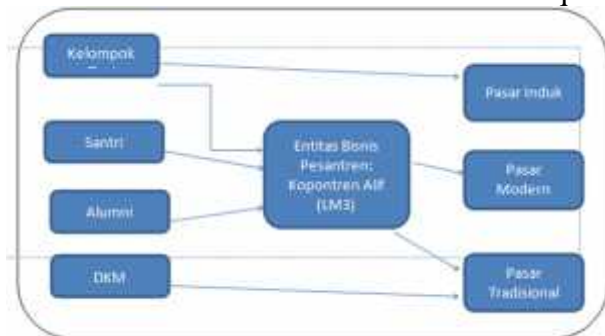
Pola kerja sama bisnis kemitraan yang dibangun oleh pesantren Al-Ittifaq dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Jaringan Kerjasama Kemitraan



Sedangkan pola pemasaran produk-produk agribisnisnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Pola Pemasaran Entitas Bisnis Al-Ittifaq



Segala kebutuhan komoditas kopontren diutamakan dipasok dari budidaya sendiri dan dukungan anggota jaringan. Apabila masih ada kekurangan, maka kopontren menjalin kerjasama dengan pihak lain atau bahkan belanja ke pasar induk Caringin. Pihak supermarket memesan juga jenis-jenis kebutuhan yang tidak ditanam di wilayah Rancabali dan sekitarnya.

Dalam konteks itulah, jaringan kemitraan menempati posisi strategis bagi keberlangsungan dan pengembangan fungsi pesantren. Jaringan kemitraan bukan hanya dapat menopang keberlangsungan lembaga, namun juga menopang peranan dan fungsi pesantren dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan kekuatan jaringan kemitraan yang didukung kapabilitas sumber daya manusia, secara otomatis akan meningkatkan daya saing lembaga tersebut.

Jaringan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada umat, dipelihara dan dipupuk melalui berbagai sarana silaturahmi yang terstruktur; pengajian mingguan, bulanan

dan momen-momen peringatan hari besar Islam di 36 DKM masjid. Momen peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi merupakan momentum ukhuwah dan silaturahmi terbesar. PHBI inipun di setting dalam konteks untuk kemajuan masyarakat. Pembangunan masjid, pesantren, sarana pendidikan, madrasah diniyah ditopang oleh pengumpulan dana umat dari momen-momen itu.

Setiap tahun kepanitiaan PHBI di setiap DKM mendapatkan surplus dana, sehingga dapat dialokasikan untuk realisasi program yang telah disepakati tahun itu. Dalam perayaan ini ditetapkan program tahunan bersama secara berkesinambungan dari dan oleh keseluruhan masyarakat jaringan pesantren Al-Ittifaq. Dengan pola ini sarana-sarana ibadah seperti pembangunan masjid, madrasah diniyah menjadi lebih lancar, tanpa bantuan pihak luar atau pemerintah. Bangunan-bangunan masjid di kampung-kampung meliputi 36 DKM, semuanya merupakan bangunan permanen yang bagus dan kokoh. Bahkan sebagian besar masjid merupakan bangunan berlantai dua, dengan kisaran luas rata-rata di atas 400 m². Kondisi dengan ritme dan karakter kemasyarakatan seperti itu, tidak terjadi dalam waktu dua tiga tahun, melainkan merupakan buah dari proses cukup panjang dari perjuangan pimpinan pesantren, pengurus, tokoh masyarakat dan alumni pesantren.

Sebagai perusahaan inti kopontren menampung dan membeli hasil pertanian dari kelompok tani, memberikan bimbingan teknis, sarana produksi, bantuan permodalan, penetapan pola tanam serta penerapan teknologi tepat guna kepada kelompok tani binaannya. Sedangkan kelompok tani sebagai plasma mandiri atau mitra mempunyai kewajiban menjual sebagian produknya melalui kopontren pada saat dibutuhkan dengan harga yang disepakati. Mematuhi standarisasi dan pola tanam serta melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi untuk dicarikan jalan keluarnya.

Kopontren melakukan olah produksi dan pemanfaatan hasil. Olah produksi meliputi proses penanaman, pemeliharaan, panen, pergudangan, hingga pemasaran. Sedangkan pemanfaatan hasil adalah proses pengelolaan asset anggota koperasi (pasca penjualan) untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pemanfaatan hasil adalah *manage* karunia Allah.¹³ Anggota kelompok petani dapat mengajukan pinjaman modal.

Dalam prakteknya, kopontren dapat diilustrasikan sebagai *play maker* dalam

permainan sepak bola, yaitu penyeimbang usaha, pemberi umpan, pendorong serangan (marketing) dan lain-lain. Kopontren dapat melakukan penguatan fungsi pemasaran; mempertahankan kongsi yang ada dan mencari memperluas pasar baru.

Manajemen Daya Guna Karunia Allah

Program peningkatan kesejahteraan sosial diterapkan oleh pesantren Al-Ittifaq dilakukan dengan membudayakan sistem pemanfaatan hasil, yaitu melalui arisan-arisan dan tabungan-tabungan yang terstruktur. Ditradisikan pula pengumpulan dana infak shadaqah pada setiap momen-momen peringatan hari-hari besar Islam (PHBI).

Pemanfaatan hasil adalah pengelolaan asset anggota jaringan entitas bisnis kopontren atau simpatisan pesantren yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan. Biaya pendidikan anak, renovasi rumah atau pembangunan rumah, pembelian modal tanah, sepeda motor, mobil, ibadah ibadah haji dan umrah. Sistem arisan dan tabungan meliputi arisan modal usaha, arisan Hari Raya Idul Fitri, qurban, arisan rajaban, arisan muludan dan lain-lain. Pemanfaatan hasil adalah memenej secara terencana terhadap karunia rezeki Allah SWT.

Pola pemanfaatan hasil yang terencana demikian, tercermin dalam penuturan bi Haji

¹³Model pemanfaatan hasil diarahkan untuk keperluan-keperluan seperti biaya pendidikan, program renovasi rumah, pembangunan rumah, *walimatul ursy*, pembelian mobil, ibadah Qurban, ibadah haji dan umrah. Kini setiap tahun dari pesantren dan masyarakat sekitar dapat memberangkatkan jama'ah haji sebanyak 40 orang dan jama'ah umrah 30 orang. Bagian ini akan dibahas kembali pada bahasan tersendiri di bab VI.

Hasanah, atau bi Haji istri KH Fuad Affandi pimpinan pesantren;

“Sebaik-baik sesuatu yang ada persiapannya tidak akan sejelek yang tanpa persiapan. Sebaik-baiknya yang tidak ada persiapan tidak akan sebaik yang ada persiapannya. Yang dipersiapkan pasti akan jauh lebih baik dari pada yang tidak dipersiapkan.”¹⁴

Posisi bi Haji, memiliki peran cukup sentral dalam pola pemanfaatan hasil, terutama di kalangan ibu-ibu dan santri yang merasa malu jika berhubungan langsung dengan pimpinan pesantren. Dalam pengakuan Eulis Rukayah, Ucu Siti Aisyah, Mudrik, Yuda, Bi Haji adalah ibu semua, seperti “indung sorangan” (ibu kandung),¹⁵ tempat berkeluh kesah, mengadu berbagai permasalahan rumah tangga, sampai meminta atau meminjam uang.

Kini pemanfaatan hasil itu dikelola oleh Kopontren dengan melibatkan sejumlah santri alumni sebagai koordinator arisan per peruntukan. Setiap satu jenis tabungan atau arisan dipegang oleh satu orang, yang bertanggung jawab pada kopontren dan pimpinan pesantren. Terdapat berbagai arisan dan tabungan seperti arisan qurban, idul fitri, modal kerja, renovasi rumah, bangun rumah, umrah, haji, biaya sekolah dan lain-lain.

Sebelum ada kopontren, semua pemanfaatan hasil ditangani langsung oleh bi Haji. Pola pemanfaatan hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, di kalangan santri. Semua santri yang terlibat dalam entitas bisnis pesantren mendapatkan hasil atau *ujrah* sesuai standar kebiasaan. Untuk mendidik dan membina dalam pemanfaatan hasil, *ujrah* atau gaji para santri tidak diberikan seluruhnya. Sebagian besarnya ditabung melalui bi Haji di kopontren.

Penetapan pola ini didasarkan pada kenyataan, yang paling sulit adalah pengendalian diri dari berbagai keinginan ketika mempunyai uang, yaitu dorongan membelanjakan terhadap hal-hal di luar dibutuhkan. Demikian pula, jarangya memperhitungkan kebutuhan masa depan. Dalam kondisi kekurangan materi, mengetatkan ikat pinggang dalam hal pengeluaran adalah relatif mudah. Namun dalam kondisi ketika ada uang, adalah sangat sulit menahan diri dari godaan konsumerisme. Dengan pola itu, para santri ditekankan melakukan proporsionalisasi pengeluaran, apalagi kebutuhan sehari-hari telah ditanggung pesantren.

Sementara itu, karena kepercayaan penuh terhadap kiai dan pesantren, para santri sama sekali tidak merasa dirugikan apalagi tereksplotasi. Mereka berkerja dan berusaha

¹⁴Wawancara bi Haji, 4 September 2011 dan 5 Pebruari 2012.

¹⁵Indung dalam bahasa Sunda berarti sama sama dengan ema, namun bermakna lebih dekat sebagai pemberi perlindungan, atau “*tempat panyalindungan*.” Panggilan ini banyak digunakan di kalangan masyarakat pertanian.

semata-mata tugas pengabdian pada pesantren. Di sinilah unsur kekhidmatan, kepercayaan atau *trust* dan tanggung-jawab yang tinggi menyatu hingga menumbuhkan produktivitas yang tinggi.

Capaian pengembangan ekonomi agribisnis pesantren al-Ittifaq telah membuktikan suatu rekonstruksi peran sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan sosial, melampaui jaminan sosial, melainkan pemberdayaan sosial ekonomi. Di antara indikator kemajuan yang dicapai oleh masyarakat pesantren adalah penghasilan bulanan rata-rata dan meningkatnya jama'ah Haji dan Umrah setiap tahun.

Kemampuan daya beli dan “*fund raising*” yang baik dari masyarakat jaringan pesantren, memperlihatkan capaian tingkat kesejahteraan bahkan transformasi ekonomi masyarakat sebagai dampak positif dari kesuksesan usaha-usahanya. Sejak tahun 2007, jumlah jama'ah haji tidak kurang lebih 40 orang dan umrah 30 orang setiap tahunnya. Selain itu terlihat pula dari pendapatan rata-rata per bulan.

Dari sejumlah informan, diperoleh data penghasilan para anggota jaringan yang dikelompokkan berdasar klasifikasi kepemilikan lahan dan pendapatan per bulan sebagai berikut:

Tabel 1
Penghasilan Bulanan Anggota Jaringan

Kelompok	Lahan (Tumbak)	Lahan (M2)	Penghasilan Rata-rata per Bulan
I	200 – 350	2800 - 4900	5.000.000- 6.500.000
II	400 - 600	5600 - 8400	7.000.000 - 9.000.000
III	650 – 750	9100 - 10500	10.000.000 - 12.000.000
IV	800 -1000	11200 - 14000	13.000.000 - 18.000.000
V	1000	> 14000	> 20.000.000

Luas lahan yang mereka miliki, tidak semuanya hak milik sendiri melainkan lahan sewaan. Peningkatan penghasilan mereka, disamping dari hasil jenis sayur mayur yang tumbuh di wilayah pegunungan, terutama pada kelompok III, IV dan V, ditopang oleh *booming* buah stroberi sejak tahun 2000an hingga kini. H Awan Rukmawan misalnya, yang dulu aktif dalam budidaya dan mengirim aneka sayur mayur ke berbagai pasar induk di Jakarta, kini lebih fokus dalam pengepakan buah stroberi untuk dikirim ke berbagai supermarket di berbagai kota bahkan ada yang diekspor sampai ke Dubai.¹⁶

Penutup

Sejarah telah membuktikan bagaimana peran dan fungsi pesantren dalam dimensi

¹⁶ Hasil wawancara dan observasi peneliti.

sosial dakwah dan pendidikan. Ketika kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi semakin mengedepan, sementara peran negara memiliki keterbatasan, maka lembaga-lembaga non pemerintah dapat memainkannya. Perluasan pesantren dari fungsi sosial pendidikan menjadi fungsi sosial ekonomi berpotensi kuat menjadi pesantren kesejahteraan. Kesejahteraan santri dan masyarakat terbukti dapat dicapai melalui optimalisasi fungsi kepemimpinan yang didukung oleh jaringan usaha ekonomi pesantren. Pesantren al-Ittifaq misalnya dapat merealisasikan kesejahteraan sosial melalui sistem jaringan bisnis kolejial: kopontren sebagai inti plasma, kelompok tani, DKM, dan alumni sebagai plasma mandiri. Hal itu dapat realisasi melalui manajemen daya guna karunia Allah berdasar *trust* yang tinggi terhadap pesantren. Dengan peran dan fungsi yang baru ini maka, pesantren telah menjadi sumber dan penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan rekonstruksi peran sosial ekonomi yang diemban oleh pesantren, pesantren Al-Ittifaq telah membuktikan diri sebagai model pesantren kesejahteraan, yaitu pesantren yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bahkan mengimplementasikan keadilan sosial. Diharapkan sejumlah pesantren yang potensial dapat mengikuti pola ini.

Referensi

- Amin Haedari, "Beberapa Pemikiran Pengembangan Pondok Pesantren (Sebuah Dinamika), makalah pada kuliah umum Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 September 2008
- Bogdan Robert C Biklen Sari Knop, *Qualitative for Education an Introduction to Theory Methods*, (Boston London Sydney-Toronto: Allyn and Bacon, 1992)
- Irwan Abdullah dkk. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2008)
- John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Desain*, (California: Sage Publications, 1998)
- Majalah Tempo, edisi 21-27 September tahun 2009
- Manfred Oepen. dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, (Jakarta, P3M, 1988)
- Shihab, M Quraish, "Etika Bisnis dalam wawasan al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an* No 3/ VII, 1997
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia, 2004

- Suyata, "Pesantren sebagai Lembaga Sosial yang Hidup", dalam M Dawam Rahardjo, ed. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta:P3M, 1985), hlm. 16-17.
- Tim Pekapontren, *Potensi Ekonomi Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004)
- Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Zarqa, Muhammad Anas, "Islamic Distributive Scheme", *Readings in Public Finance in Islam*, Edited by Mahamoud A. Gulaid & Mohamed Aden Abdullah (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI) – Islamic Development Bank (IDB), 1995)